INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4944-4954

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian dalam Meningkatkan Likuiditas
(Studi Kasus pada BPKD Nagan Raya)

Ita Juliana
Universitas Teuku Umar
Email: itaj741@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam meningkatkan likuiditas pada pemerintahan Kabupaten Nagan Raya. Analisis ini dikaji secara deskriptif-kualitatif yang menggunakan data sekunder yang kumpulkan berdasarkan hasil wawancara pada pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang menjadi sampel dari penelitian ini. Analisis data penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara bersama narasumber dan mengamati secara langsung di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa menerima anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian secara bersama-sama memberikan pengaruh secara signifikan dalam meningkatkan likuiditas.
Kata Kunci: *Anggaran Kas, Perencanaan dan Pengendalian, Likuiditas*

Abstract

This is research aims to analyze the cash budget as a planning and control tool increasing liquidity in the Nagan Raya Regency Government. This analysis is studied descriptively qualitatively using secondary data collected based on the results of interviews in each Nagan Raya Regency which is the sample of this research. The research was carried out by describing the results of the interviews together and observing directly in the field. The results of this research show that accepting the cash budget as a planning and control tool simultaneously has a significant influence in increasing liquidity.
Keywords: *Cash Budget, Planning and Control, Liquidity*

Copyright @ Ita Juliana

PENDAHULUAN

Likuiditas merupakan salah satu alat yang paling penting bagi keberlangsungan pemerintahan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis rasio merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu perkiraan dengan perkiraan yang lain dalam laporan keuangan yang sama. Fungsi adanya analisis rasio adalah sebagai alat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu entitas dan sebagai peringatan terhadap kehadiran suatu masalah. Pemerintah daerah untuk mengetahui kemampuannya dalam membayar utang jangka pendeknya yaitu menggunakan rasio likuiditas. (Hadi, 2015)

Likuiditas dalam pemerintah adalah situasi di mana pemerintah memiliki jumlah uang tunai atau aset yang mudah dicairkan dalam jumlah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhannya. Likuiditas dalam pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, pinjaman, dan investasi. (Dodo Suharto & Herman Wibowo, 2013)

Ketika pemerintah memiliki likuiditas yang cukup, ini memungkinkan mereka untuk membiayai program-program dan proyek-proyek yang diperlukan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, tanpa kesulitan keuangan. Namun, jika likuiditas pemerintah rendah hal ini dapat mengarah pada kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan, seperti membayar utang atau gaji pegawai. Penting bagi pemerintah untuk mengelola likuiditas mereka dengan bijak untuk memastikan stabilitas keuangan dan kelancaran operasi pemerintah. Ini melibatkan perencanaan anggaran yang hati-hati, pengelolaan utang yang bijak dan diverifikasi sumber pendapatan. (Dodo Suharto & Herman Wibowo, 2013).

Tahun	Aset Lancar	Kewajiban Jangka Pendek	Debt to Asset Ratio
2020	52.766.778.400,88	45.943.981.281,10	1.14
2021	65.424.636.024,2 8	39.261.021.852,0	1.66

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya TA 2022

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban jangka pendek semakin berkurang mulai dari tahun 2020 sebesar 45.943.981.281,10 menjadi 39.261.021.852,0 pada tahun 2021 hutang Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menurun, sementara pendapatan asli daerah bertambah dari tahun 2020 sebesar 52.766.778.400,88 menjadi 65.424.636.024,28 pada tahun 2021. Berarti tabel diatas menunjukan bahwa BPKD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2021 mengalami peningkatan pada tahun 2020 Debt to Asset Ratio hanya sebesar 1.14 persen sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1.66 persen. Hal ini menunjukan bahwa BPKD Kabupaten Nagan Raya

Copyright @ Ita Juliana

memiliki kemampuan untuk menutupi total hutang dengan aset yang dimiliki.

Permasalahan likuiditas terjadi di pemerintah daerah karena pemerintah belum melakukan upaya yang maksimal dalam pengumpulan pendapatan asli daerah, upaya pengumpulan ini di karenakan perencanaan dalam menyusun anggaran kas. Perencaanaan dan Pengendalian anggaran memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga ke stabilan pendapatan daerah.

Tujuan penyusunan angaran kas adalah untuk menentukan saldo kas akhir setiap periode, mengetahui kelebihan dan kekurangan kas pada waktunya, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tidak lancar, utang, modal, dapatan dan beban. Fungsi anggaran sebagai salah satu alat pemerintah dalam pencapaian tujuan, anggaran kas digunakan sebagai alat perencanaan yang harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran yang lain. Anggaran juga di gunakan sebagai pedoman pelaksana pekerjaan, dimana sebelum melakukan pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari yang berwenang (bagian keuangan). Anggaran kas sebagai alat pengawasan atau pengendalian dengan mengevaluasi atau menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan. (Nafarin, 2013)

Tingkat likuiditas suatu pemerintahan merupakan suatu hal yang penting dan memerlukan pertimbangan tersendiri dalam mengelolanya, karena tingkat likuiditas suatu pemerintahan mencerminkan kemampuan otoritas publik dalam memenuhi kebutuhannya. komitmen moneter atau biaya fungsional dengan memanfaatkan sumber daya yang dipertukarkan secara efektif dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi komitmen dan kebutuhan. Dalam memperkirakan derajat likuiditas suatu pemerintahan, standar diharapkan dapat mengukur kondisi derajat likuiditas tersebut. Pada kenyataannya, pengendalian rencana keuangan tunai seringkali menimbulkan permasalahan seperti tingkat likuiditas yang ekstrim (Over Fluid) dan likuiditas yang rendah (Under Fluid). Tingkat likuiditas dewan pemerintah dalam mengelola keadaan Over Fluid dan Under Fluid berbeda-beda pada setiap pemerintahan.

Penelitian yang dipimpin oleh: Tri Etika Wulandari (2018) dengan judul "Investigasi Rencana Pengeluaran Uang Sebagai Instrumen Persiapan dan Pengendalian Untuk Memperluas Likuiditas Pada PT. Sarah Cell Sulawesi". Dari hasil penelusurannya ditemukan bahwa hasil estimasi menunjukkan bahwa Proporsi Uang, Proporsi Lancar, dan Proporsi Cepat mengalami kenaikan dan penurunan yang berfluktuasi, namun secara eksplisit pada tahun 2016 proporsi likuiditas mengalami penurunan, hanya proporsi berjalan yang dapat menjamin kewajiban lancar. Kesiapan rencana keuangan uang PT Sarah Cell dapat mensurvei tingkat likuiditas organisasi, hal ini terlihat dari berapa rencana pengeluaran uang yang dapat diakses pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 21.757.387.634, sedangkan

Copyright @ Ita Juliana

berapa besar kewajiban lancar pada tahun 2016 sebesar Rp 21.747.229.849, hal ini berarti bahwa PT Sarah Cell sedang dalam kondisi sangat baik. cair, ditunjukkan dengan banyaknya resiprokal tunai yang tersedia tanpa henti yang dapat digunakan untuk membayar/membayar kewajiban sementara. Febby Fabiola Adyana Poetri (2014) Dampak rencana keuangan uang terhadap likuiditas dan pengaruhnya terhadap manfaat fungsional. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rencana pengeluaran uang memberikan pengaruh namun tidak kritis terhadap likuiditas sebesar 3,91 dengan klasifikasi hubungan rendah. Fluktuasi variabel likuiditas dipengaruhi oleh rencana pengeluaran uang. Suci Siti Nurfadillah (2016) "Dampak Rencana Pengeluaran Uang Sebagai Instrumen Pengatur dan Alat Pengendali Terhadap Tingkat Likuiditas (Investigasi Kontekstual pada KCP Luragung Bina Raharja Kuningan Bermanfaat)" Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa faktor rencana keuangan sebagai instrumen pengatur mempunyai pengaruh likuiditas sedangkan faktor rencana pengeluaran uang tunai sebagai alat pengendali mempunyai dampak namun tidak kritis dan negatif terhadap likuiditas, dan pada saat yang sama hipotesis diterima.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan anggaran kas dengan likuiditas dengan harapan untuk menguatkan teori, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian yaitu waktu dan tempat penelitian.

Dari gambaran peneliti dan kesimpulan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Dalam Meningkatkan Likuiditas yang telah di jelaskan. Maka rumusan Masalah yang di ambil yaitu:

Bagaimana Analisis Fungsi Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Dalam Meningkatkan Likuiditas pada pemerintahan Kabupaten Nagan Raya Sedangkan tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran anggaran kas sebagai alat pengendali dalam meningkatkan likuiditas. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah terkait penjagaan terhadap likuiditas. Kontribusi secara teoritis sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan referensi dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap keuangan daerah.

Copyright @ Ita Juliana

METODE PENELITIAN

Objek dan Lokasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek alamiah, dan peneliti sebagai instrumen kecil (Sugiono, 2018:15). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang dimana peneliti mendeskripsikan wawancara mendalam dan surveysubjek penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pada instansi BPKD yang terletak di Kabupaten Nagan Raya, penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, data primer ini di dapatkan dengan Teknik pengumpulan data yaitu wawancara terstruktur dengan pertanyaan wawancaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran kas sebagai alat perencana dan pengendali?
2. Bagaimana anggaran kas sebagai alat perencana dalam menentukan tingkatlikuiditas keuangan?
3. Bagaimana pemerintah daerah menjadikan anggaran kas sebagai alat pengendali dalam menentukan tingkat likuiditas di pemerintah daerah?
4. Apa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah/ BPKD dalam menentukan likuiditas keuangan?
5. Apa strategi yang sudah digunakan pemerintah daerah untuk mengatasiLikuiditas Keuangan?

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kasi Pengelolaan	1 Orang
2	Kasi Pelaporan	1 Orang
3	Bendahara	1 Orang
4	Pegawai	1 Orang
	Jumlah	4 Orang

Copyright @ Ita Juliana

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perencanaan kas terhadap anggaran kas di BPKD Nagan Raya pertama-tama dimulai dari tahap Penyusunan anggaran kas, berdasarkan wawancara dengan "Bapak T. Irwansyah Selaku Kasi Pengelolan beliau menjelaskan bahwa perencanaan anggaran kas dimulai dari PPKD menyusun anggaran kas untuk mengatur adanya dana untuk pengeluaran dan penarikan sesuai dengan rencana penarikan,"

"Pernyataan Ibu Nelda Hastuti Selaku Kasi Pelaporan sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak T. Irwansyah Selaku Kasi Pengelolan beliau juga menjelaskan perencanaa pengeluaran uang tersebut dilengkapi sebagai berikut:

1. PPKD selaku Kuasa BUD menyiapkan rencana keuangan kas Pemerintah Kabupaten untuk mengelola aksesibilitas aset untuk keperluan subsidi sesuai rencana penarikan aset yang dituangkan dalam SKPD DPA.
2. Rencana belanja kas Pemerintah Daerah memuat penilaian terhadap pengakuan pendapatan kabupaten dan rancangan konsumsi daerah setiap bulan, yang informasinya bersumber dari penyusunan dan sinkronisasi rencana keuangan kas SKPD."

Dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Bapak T. Irwansyah Selaku Kasi Pengelolan dan Ibu Nelda Hastuti Selaku Kasi Pelaporan memiliki jawaban yang sama. Perencanaan anggaran kas memiliki ketentuan-ketentuan "berdasarkan wawancara dengan Ibu Nelda Hastuti Selaku Kasi Pelaporan terkait ketentuan perencanaan anggaran kas beliau menjelaskan sebagai berikut:

1. Kesiapan penilaian arus kas masuk dalam rencana pengeluaran kas pemerintah daerah, ditentukan dengan mempertimbangkan rencana pendapatan sub-substansi objek pembayaran dan rencana pendapatan pendanaan setiap bulan dengan memperhatikan penilaian musim penerimaan uang pada daerah. Rencana keuangan kas DPA-SKPD dan SKPD.
2. Akibat perhitungan rencana pendapatan per subrincian pos pembayaran dan penerimaan pendukung, dituangkan dalam laporan rencana keuangan uang yang memuat rencana keuangan ukuran penerimaan gaji dan dana selama satu tahun serta susunan penerimaannya untuk setiap tahun. bulan.
3. Kesiapan alat ukur pencairan uang pada rencana belanja kas pemerintah provinsi, ditentukan berdasarkan rencana belanja per subrincian objek setiap bulannya dengan memperhatikan musim pelaksanaan sub pelaksanaan pada SKPD DPA dan rencana belanja kas SKPD serta komponen angsuran untuk belanja sub tindakan dan

Copyright @ Ita Juliana

rencana Penggunaan dana setiap bulan bergantung pada rencana keuangan konsumsi yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Hasil perhitungan rencana konsumsi per subrincian item penggunaan dan konsumsi dana dicatat dalam catatan rencana keuangan aktif uang yang berisi rencana keuangan penggunaan lengkap dan konsumsi pendukung selama satu tahun dan rencana penggunaan setiap bulan.
5. Perencanaan Uang Rencana keuangan memuat data aliran informasi serta pemanfaatan dan penyajian laporan yang dilakukan secara elektronik.
6. Perubahan terhadap rencana Pengeluaran Uang dapat dilakukan dengan asumsi bahwa terdapat keadaan-keadaan yang menyertainya:
   a. Angsuran biaya-biaya penting bersifat wajib dan membatasi.
   b. Angsuran untuk biaya reaksi krisis atas kegagalan, perselisihan sosial, atau peristiwa-peristiwa luar biasa yang berpotensi terjadi.
   c. Terjadi perubahan jadwal kegiatan / sub kegiatan akibat keadaan"

"Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sana Dewi Selaku bendahara beliau juga menjelaskan hal yang sama dengan Ibu Nelda Hastuti Selaku Kasi Pelaporan bahwa Kesiapan penilaian arus kas masuk dalam rencana keuangan kas pemerintah kabupatenditentukan dengan mempertimbangkan rencana pendapatan untuk sub-seluk beluk pos pembayaran dan rencana penerimaan dana setiap bulannya, kemudian konsekuensi perhitungan rencana pendapatan per sub-rincian pembayaran Barang-barang dan penerimaan pendukungnya disimpan dalam laporan rencana keuangan uang yang memuat berapa besar rencana pengeluaran pendapatan, Perencanaan alat pengukur pengeluaran uang ditentukan dengan melihat rencana konsumsi per sub-detail objek setiap bulannya mengingat musim pelaksanaan sub-detail. -pelaksanaan rencana pengeluaran kas SKPD DPA dan SKPD, sedangkan perkiraan rencana penggunaan per subrincian objek penggunaan dan penggunaan dana dicatat dalam catatan rencana pengeluaran lonjakan uang yang memuat penjumlahan rencana keuangan dan penggunaan penunjang secara konsisten dan tahunan."

Dari dua pernyatan tersebut menunjukkan bahwa kedua narasumber mengatakan hal yang sama.

"Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khaifal Mubarak Selaku pegawai terkait Proses penyusunan anggaran kas sebagai alat perencana dan pengendalian, beliau menjelaskan dalam anggaran kas segala perencanaan berapa tingkat likuiditas anggaran dalam menentukan kemauan suatu pemerintah daerah dalam menjalankan aktifitas APBD dalam merealisasikan anggaran belanja daearah, di susun dari perencanaaan

Copyright @ Ita Juliana

anggaran kas terhadap semua OPD ataupun SKPD, dikatakan sebagaialat perencanaaan menentukan tingkatan likuiditas dalam anggaran kas pihak pemerintah akan mengukur terhadap anggaran kas yang ada dalam tahun berjalan untukmelihat kemampuan dari daerah dalam memenuhi kewajiban ataupun hutang yangsudah ada pada tahun berjalan yaitu sebagai untuk menentukan tingkat likuiditaskeuangan di dalamnya pihak pemerintah akan menentukan satu rasio likuiditas pengukurannya terhadap penggunaan anggaran kas pada tahun berjalan."

"Berdasarkan wawancara dengan Bapak T. Irwansyah Selaku Kasi Pengelolaan beliau juga menjelaskan hal yang sama dengan Bapak Khaifal Mubarak Selaku Pegawai yaitu tingkat likuiditas merupakan hal yang penting dalam perencanaan anggaran kas, dari perencanaan anggaran kas terhadap OPD, alat perencanaan sangat menentukan tingkatan likuiditas dalam anggaran kas pemerintah akan mengukur anggaran kas yang ada pada tahun yang sedang berjalan".

Pemerintah daerah menjadikan anggaran kas sebagai alat pengendali dalam menentukan tingkat likuiditas di pemerintah daerah, "berdasarkan wawancara dengan Ibu Nelda Hastuti Selaku Kasi Pelaporan beliau menjelaskan bahwa sebagai tolak ukur pemerintah daerah yang menjadi anggaran kas terhadap untuk menentukan likuiditas daerah yaitu berdasarkan pendapatan dan belanja daerah yang dari mana kemampuan suatu daerah untuk melihat kemampuan dan pengendalian keuangan suatu pemerintah daerah. jadi di liat dari suatu kemampuan pendapatan daerah dan juga pendapatan trasfer lainnya di pemerintah daerah yang berhubungan dengan kas yang ada di pemerintah daerah yaitu RKUD kas yang ada di pemerintah daerah. yang di ukur berdasarkan aktiva lancar, adanya kas bendahara umum daerah adanya piutang dan ada beberapa aitem akun aktiva lancar untuk melihat pengendalian kemampuan suatu daerah."

"Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sana Dewi Selaku bendahara beliau juga menjelaskan hal yang sama dengan Ibu Nelda Hastuti Selaku Kasi Pelaporan yaitu secara khusus menjadi acuan bagi pemerintah daerah, digunakan sebagai anggaran kas untuk menentukan likuiditas daerah berdasarkan pendapatan dan belanja daerah, berdasarkan kemampuan daerah dalam melihat kapasitas dan pengendalian anggaran pemerintah daerah serta kas pemerintah lainnya."

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah/ BPKD dalam menentukan likuiditas keuangan, "berdasarkan wawancara dengan Bapak T.Irwansyah Selaku Kasi Pengelolaan beliau menjelaskan permasalahan yg di hadapi dalam pemerintah daerah sebagaimana BPKD yang menanggung jawab dalam proses pengangaran penata usahaan dan pertanggung jawaban terhadap APBD sering terjadi permasalahan adalah kurangnya

Copyright @ Ita Juliana

optimal dari pada kinerja sumber daya dari pihak OPD ataupun SKPK yang berkait dalam menentukan *deadline* mulai dari pada penyusunan anggaran tidak tepat waktu dari pada SKPK sampai dengan pelaksana resasi anggaran dan juga sampai dengan proses petanggung jawaban dari pada SKPK sendiri."

"Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sana Dewi Selaku bendahara dan mengungkapkan perihal yang sama dengan Bapak T. Irwansyah Selaku Kasi Pengelolaan bahwapermasalahan dalam proses pertanggung jawaban terhadap proses penganggaran penatausahaan dan tanggung jawab terhadap APBD dan sering adanya permasalahan pada kinerja sumber daya dari pihak OPD atau SKPK sesuai jadwal yang sudah ditentukan"

Dari hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa tidak adanya perbedaan dari setiap informan, dimana jawaban yang diperoleh oleh peneliti sama semua. Adapun strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi likuiditas keuangan yaitu:

1. Strategi Mengatasi Likuiditas dalam Penyusunan Anggaran Tepat Waktu

Di mulai dari pada penyusunan anggaran yang tepat waktu yang harus di laksanakan sesuai dengan deadline waktu yang telah di tentukan oleh pusat atau di wakili dari pada kabupaten dan juga proses meresasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada.

2. Analisis Rasio Keuangan

Strategi ekuitas keuangan terkait dengan angaran kas itu akan pemerintah daerah akan melakukan analisis rasio keuangan. Ada beberapa rasio analisis yaitu: Rasio likuiditas, kas rasio dan juga beberapa rasio yang menyangkut dengan kas rasio itu kita mengukur kemampuan satu daerah itu membayarhutang yang segera di penuhi dengan kas yg tersedia dan surat yang berharga yang ada yang dapat di uangkan. Pengukuran rasio keuanganuntuk menemukan kemampuan satu daerah untuk mengatasi ekuitas itu kemampuan dari padapemerintah daerah pengukur rasio perbandingan dari pada tahun sebelumnya mines 1 dari pada tahun yang akan berjalan.

Copyright @ Ita Juliana

SIMPULAN

Rencana keuangan adalah instrumen administratif yang menjamin pencapaian tujuan hierarki atau organisasi dan menawarkan aturan pragmatis untuk tugas sehari-hari. Pengaturan kas dapat dilihat dari sudut pandang perencanaan. Tugas rencana keuangan uang adalah menjaga tingkat likuiditas dan keuntungan. Dengan adanya rencana pengeluaran uang, para perintis perkantoran dapat mengetahui apakah organisasinya akan mendapatkan uang berlebih dan mengalami kekurangan uang tunai. Dengan rencana keuangan uang ini, segala jenis pergerakan dapat dikendalikan. Rencana keuangan uang juga berperan dalam tugas-tugas yang dilakukan oleh organisasi, khususnya dalam bidang penggunaan dana agar bersifat efektif dan terkendali, khususnya dalam mengatur arus kas masuk (cash inflow) dan arus kas keluar (cash outpouring). Menyusun rencana keuangan keuangan merupakan hal yang penting bagi organisasi karena selain dapat digunakan untuk mengatur dan mengendalikan dana organisasi, juga dapat digunakan untuk lebih mengembangkan likuiditas. Likuiditas dijadikan salah satu variabel penentu kemajuan suatu organisasi, karena likuiditas dapat memberikan gambaran keuntungan dan kerugian organisasi. Dalam likuiditas juga dapat dilihat apa artinya bagi manfaat fungsional selanjutnya. Eksplorasi ini menggunakan metodologi subjektif dengan teknik memukau yang dilakukan di Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Sumber Daya Kabupaten (BPKD) Pemerintah Nagan Raya. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menoleransi rencana keuangan uang sebagai alat persiapan dan pengendalian secara bersama-sama mempunyai dampak penting dalam meningkatkan likuiditas.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi Dwi Saputri (2019) *"Analisis Anggaran Operasional sebagai alat pengendalian Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kabupaten Brebes.* Politeknik Harapan Bersama.

Devi Lukitasari Sukijayanti (2016) *"Pengaruh Likuiditas, Leverage, Aktivitas dan Pertumbuhan Terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Tahun 2011-2013 di kabupatenJawa Timur".*

Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya TA 2022

Emi M, Kahar Karya Sarjana Harapan (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK) 1 (1), 33-46, 2018. Volume 1 no. 1 Oktober tahun 2018, (e-ISSN: 2623-2596.

Nor Muhammad Elfian & Suwitho (2019) *" Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap*

Copyright @ Ita Juliana

Nilai Perusahaan Food and Beverage. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen. e-ISSN: 2461- 0593.

Putri Novalina Silalahi (2017*) "Pengaruh Anggaran Kas sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian terhadap Likuiditas pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.*

Rusliaman Siahaan, *et, al*. *Manajemen, Edisi Pertama*: Universitas HKBP Nommersen, Medan, 2016. Hal. 111.

Suci Siti Nurfadillah (2016) *"Pengaruh Anggaran Kas sebagai alat Perencanaan dan Alat Pengendalian terhadap Tingkat Likuiditas (Studi Kasus pada Koperasi Bina Raharja Kuningan KCP Luragung).* Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sugiyono (2019). *Memahami Penelitian Kualitatif*. bandung Alfabeta.

Tri Eka Wulandari (2018) *"Analisis Anggaran Kas sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian untuk Meningkatkan Likuiditas pada PT.Sarah Cell Sulawesi.* Universitas Muhammadiyah Makassar.

Copyright @ Ita Juliana